

1. Lampiran Berita Acara Wawancara

BERITA ACARA WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **”Kolaborasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”** telah dilakukan wawancara dengan informan yang berjumlah 6 orang. Adapun rincian informan dengan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

No	Nama	P/L	Jabatan	Pendidikan	Tanggal Wawancara
1	Yana	L	Kepala Desa	SMA	Kamis, 22 Februari 2024
2	Wahyu Yuliana	L	Kaur Perencanaan	SMA	Jumat, 22 Maret 2024
3	Iwan Setiawan	L	Kasi Pelayanan	SMA	Senin, 19 Februari 2024
4	Aceng Koswara, S.IP	L	Ketua BPD	S1	Kamis, 22 Februari 2024
5	Karlan, M.Pd.	L	Sekjen Gaspol	S2	Kamis, 21 Maret 2024
6	Heryadi	L	Masyarakat	SMP	Jumat, 29 Maret 2024

Dengan demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni sebagai bukti telah melakukan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan berkaitan dengan **”Kolaborasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ”**.

2. Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA SUKAMULYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal), dengan indikator sebagai berikut:
 - A. Adanya Sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang memadai mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dalam melaksanakan kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya, jika ada siapa saja?
 2. Menurut Bapak/Ibu hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?
 3. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang harus dilakukan mengatasi hambatan tersebut?
 - B. Adanya riwayat kerjasama atau kolaborasi sebelumnya mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada riwayat kerjasama atau kolaborasi sebelumnya mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?
 2. Menurut Bapak/Ibu hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan kerjasama tersebut?

3. Menurut Bapak/Ibu upaya yang harus dilakukan mengatasi hambatan tersebut?
2. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi), dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - A. Adanya dialog tatap muka antar instansi, untuk membahas kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada dialog tatap muka antar instansi untuk membahas kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?
 - B. Adanya kepercayaan antar instansi yang berkolaborasi dalam mengambil kebijakan guna mencapai tujuan bersama
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kepercayaan antar instansi yang berkolaborasi dalam mengambil kebijakan?
 - C. Adanya pemahaman dan kesepakatan yang sama mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pemahaman dan kesepakatan yang sama mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?
3. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan), dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - A. Adanya partisipasi aktif dari pihak yang berkolaborasi dalam memberikan masukan maupun pengambilan keputusan
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada partisipasi aktif dari pihak yang berkolaborasi dalam memberikan masukan maupun pengambilan keputusan?
 - B. Adanya transparansi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada transparansi dari seluruh pihak yang terlibat dalam kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?
4. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif), dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - A. Adanya pengawasan dan evaluasi mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya
 1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan dan evaluasi mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya?

3. Lampiran Wawancara

Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara
1. <i>Starting Conditions</i> (Kondisi Awal)	1. Adanya sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang memadai mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya	<p>1. Kepala Desa: “Untuk sumber daya manusia (SDM) pelaksana tentu ada, karena sebelum Bapak menjadi kepala desa juga, Desa Sukamulya sudah menjadi desa mandiri, sedangkan sebelum desa mandiri kan ada desa maju, desa berkembang, dan alhamdulillah semua itu sudah terlaksana dengan baik. Adapun untuk sumber daya manusia pelaksana terdiri dari tokoh masyarakat, pihak ketiga dan komunitas/relawan. Sementara itu, hambatan sih banyak karena dalam pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur pasti ada yang pro dan juga kontra. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan masyarakat.”</p> <p>2. Kaur Perencanaan: “Sumber daya manusia (SDM) pelaksana ada, karena</p>

		<p><i>tanpa ada unsur pelaksana dari para pihak atau tokoh termuka, maka status kemandirian desa tidak akan terwujud. Sementara itu, hambatan yang dihadapi yaitu sering terjadinya pro dan kontra karena berbeda pemikiran dan cara pandang. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah dan menyakinkan dengan segala cara.”</i></p> <p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Kalau sumber daya manusia (SDM) pelaksana tentu ada, karena kemandirian secara fungsional harus tetap mandiri, disini pihak desa, masyarakat dan pihak ketiga mempunyai inisiatif sendiri, alhamdulillah Desa Sukamulya menjadi desa terbontot di dalam Desa tertinggal. Sementara itu, hambatan pasti ada, namanya kegiatan pasti ada hambatan contoh kecilnya, kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara menyikapinya dengan baik dan positif, serta saling mendukung.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Kalau sumber daya pelaksana tentu ada, dari mulai perangkat desa, unsur pemberdayaan masyarakat serta pihak ketiga semua saling keterkaitan. Sementara itu, hambatan yang dihadapi yaitu masih ada ego dari satu lembaga yang berkolaborasi, serta sinergitas kebersamaanya masih kurang pembinaan. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan rutin, menyampaikan regulasi yang ada, dan diadakan duduk bersama untuk menyatukan persepsi yang sama.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Sumber daya manusia (SDM) itu ada, kami sering</i></p>
--	--	---

		<p><i>berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam hal membuat program pembangunan fisik (jalan), maupun program pembangunan non fisik (pelatihan dan pemberdayaan). Sementara itu, hambatan terbilang sedikit hanya kurang informasi dan konfirmasi saja, antara kami dan pemerintah desa. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara berdialog dan musyawarah.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Kalau sumber daya manusia (SDM) pelaksana ada, mulai dari kadus, rt, rw, tokoh masyarakat dan pihak ketiga. Sementara itu, hambatan yang dirasakan biasanya kurang komunikasi dan informasi, sehingga kami masyarakat kurang mengetahuinya. Adapun upaya yang dilakukan dengan memberi masukan kepada pemerintah desa agar informasi bisa sampai ke masyarakat.”</i></p>
	<p>2. Adanya riwayat kerja sama atau kolaborasi sebelumnya mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya</p>	<p>1. Kepala Desa : <i>“Kalau riwayat kerja sama atau kolaborasi yang di gagas oleh gaspol dimulai dari tahun 2022, jadi riwayat kerja samanya sudah terbangun kurang lebih dua tahun setengah. Kerja sama tersebut mulai dari bidang kebersihan, pembangunan sosial dan infrastruktur, Sementara itu, hambatan pasti ada, karena di pemerintahan hambatan itu sudah menjadi resiko, yang namanya membangun pasti ada hambatan. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara musyawarah dan berdialog dengan masyarakat, karena masyarakat tidak boleh dirugikan.”</i></p> <p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Riwayat kerja sama dari dulu sudah terbangun, soalnya kalau tidak kerja sama tidak akan terwujud status kemandirian desa. Alhamdulillah dari pihak ketiga</i></p>

		<p>atau komunitas selalu mendukung baik dari materi ataupun pemikiran. Sementara itu, untuk saat ini hambatan tidak ada, karena setiap ada kegiatan baik itu pemerintah maupun pihak ketiga selalu mendukung. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara saling mendukung dan membantu.”</p> <p>3. Kasi Pelayanan: “Awalnya tidak ada riwayat kerja sama, tapi seiring berjalannya waktu kerja sama tersebut terbangun. Karena secara otodidak masyarakat sudah memahami ingin memajukan desanya sendiri, jadi mereka termotivasi, bahkan masyarakat mengerjakan tanpa upah. Sementara itu, untuk hambatan tidak ada hambatan sama sekali, mereka mempunyai haluan masing-masing. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara saling memahami, saling mendukung, dan tidak saling mengoreksi.”</p> <p>4. Ketua BPD: “Riwayat kerja sama dari dulu hanya istilah saja, karena masyarakat secara individu sudah memahami ingin memajukan desanya sendiri. Sementara itu, hambatan tidak terlalu berarti, paling ketika ada kepengurusan baru saja, kita harus pengenalan dan adaptasi kembali. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan rutin agar satu pemahaman.”</p> <p>5. Pihak Swasta: “Kami kan (Gaspol) berdirinya tanggal 25 Mei 2021, sebelumnya kami tidak tahu, namun waktu itu sudah ada relawan sosial dari Reflika, jalan ini (Sukamulya) dibangun oleh Reflika. Tapi sekarang ketika sudah ada Gaspol, alhamdulillah kami bisa berkolaborasi, kerja sama, membantu</p>
--	--	---

		<p>pemerintah desa dalam hal pembangunan fisik maupun non fisik. Sementara itu, hambatan yang dihadapi yaitu, kurangnya informasi dan komunikasi. Adapun upaya yang dilakukan dengan cara berdialog dan diskusi langsung dengan pemerintah desa.”</p> <p>6. Masyarakat: “Kalau riwayat kerja sama atau perjanjian secara tertulis kami kurang mengetahui, kami hanya menerima informasi-informasi dari pemerintah melalui kadus atau rt/rw. Sementara itu, hambatan yang dihadapi yaitu tidak sampainya informasi yang diberikan kepada kami (masyarakat). Adapun upaya yang dilakukan dengan meminta informasi kepada kepala dusun, rt maupun rw setempat.”</p>
<p>2. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)</p>	<p>1. Adanya dialog tatap muka antar instansi, untuk membahas kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya</p>	<p>1. Kepala Desa: “Kami sering berdialog tatap muka dengan masyarakat, dengan pihak Gaspolnya sendiri, itu di bidang infrastruktur. Kalau di bidang sosial dialognya sangat kokoh dan kuat. Contohnya; dialog tatap muka ketika akan mengadakan bantuan santunan anak yatim piatu, sunatan masal, beasiswa santri, renovasi sarana pendidikan, agama dan bedah rumah.”</p> <p>2. Kaur Perencanaan: “Dialog tatap muka tentu ada, kami setiap akan mengadakan kegiatan pembangunan infrastruktur, demi tersampainya tujuan tersebut sering dilaksanakannya rapat koordinasi dengan tatap muka, bersama pemerintah desa, komunitas masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.”</p>

		<p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Ada, kami sering berdialog tatap muka dengan pemuka agama atau para lembaga termasuk Rt/Rw di dalamnya, kemudian dengan relawan-relawan, komunitas, pihak ketiga. Dilaksanakannya dialog tatap muka tersebut, untuk bisa saling mendukung program dan menyatukan persepsi.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Secara khusus pernah berdialog tatap muka, dengan masyarakat, tokoh masyarakat, komunitas dan pihak ketiga, tetapi waktunya pasif atau kurang maksimal.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Kami (gaspol) sering berdialog tatap muka dengan pemerintah desa, RT, RW, masyarakat untuk menginformasikan visi dan misi gaspol, dalam hal pembangunan. Pertemuan yang kami lakukan sebanyak 28 kali pertemuan, itulah bentuk kolaborasi kami dengan pemerintah desa.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Kalau dialog tatap muka ada, kami sering dilibatkan dalam rapat desa maupun dusun, mendengarkan informasi yang disampaikan dari pihak desa maupun rt/rw.”</i></p>
	<p>2. Adanya kepercayaan antar instansi yang berkolaborasi dalam mengambil kebijakan guna mencapai tujuan bersama</p>	<p>1. Kepala Desa: <i>“Kalau kepercayaan sangat ada, kita saling percaya dalam hal pembangunan, dan anggaran. Sebagai contohnya, dalam melaksanakan pembangunan, kita saling bekerja sama dan saling percaya antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut tidak lain demi terwujudnya desa yang mandiri.”</i></p>

		<p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Timbul kepercayaan tentu ada, soalnya kalau misalkan tidak saling percaya, antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak ketiga, sepertinya tidak akan saling membantu satu sama lain.”</i></p> <p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Itu jelas ada, kita harus positif, kita harus percaya, mereka mau membangun kok, tidak mungkin membangun untuk merusak.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Kalau kepercayaan tentu ada, kita saling percaya dalam hal koordinasi, kebijakan, menyampaikan program prioritas desa, serta program-program baru yang ditambahkan.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Ada, insyaallah kami (gaspol) sangat percaya penuh kepada Pemerintah Desa, baik itu anggaran dana desanya, kebijakannya serta pelaksanaannya. Sebaliknya Pemerintah Desa juga sangat percaya penuh terhadap adanya gaspol, karena kami (gaspol) tidak meminta ke pemerintah, kami hanya menerima sumbangan dari donatur baik uang, material dan tenaga, itu semua kami tampung, untuk nantinya digunakan sebagai pembangunan fisik maupun non fisik.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Kalau kepercayaan ada, walaupun tidak sedikit sering terjadi miskomunikasi, tapi kami masih percaya, karena selalu ada laporan hasil pekerjaan dari pekerjaan yang sudah dilakukan.”</i></p>
	<p>3. Adanya pemahaman dan kesepakatan yang sama mengenai kolaborasi</p>	<p>1. Kepala Desa: <i>“Ya intinya harus ada kesepakatan, karena awalnya kan kita desa berkembang menjadi desa maju dan sekarang sudah menjadi desa mandiri, itu timbul karena adanya</i></p>

	<p>pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya</p>	<p><i>kesepakatan dan pemahaman bersama antara pihak yang berkolaborasi. Karena dalam pembangunan selalu diadakan terlebih dahulu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), nah di dalam musrenbang tersebut timbullah pemahaman dan kesepakatan bersama antar pihak yang berkolaborasi.”</i></p> <p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Itu tentu ada, yang sepaham dan sepakat ada, serta yang tidak sepaham dan tidak sepakat juga ada. Tapi kan diupayakan harus sepakat dan paham, agar terciptanya kemandirian desa.”</i></p> <p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Kalau pemahaman pasti ada, dan kesepakatan kita dituntut harus tetap sepakat, walaupun berjalan masing-masing, tapi kita saling mendukung. Contohnya mereka mau membangun jalan ini, dan pemerintah pun pasti ikut andil, begitupun sebaliknya yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan, mereka juga ikut andil. Intinya kita saling mendukung.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Terkait pemahaman dan kesepakatan, yang sepaham dan sepakat ada, serta yang tidak sepaham dan tidak sepakat juga ada. Tapi kita harus sepakat, karena dalam pembangunan kita harus sama-sama sepakat, demi tercapainya desa mandiri. Kesepakatan dan pemahaman bersama itu, terjadi ketika dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dalam artian tinggal mengeksekusi saja, karena sebelumnya sudah terjalin pemahaman dan kesepakatan bersama.”</i></p>
--	---	--

		<p>5. Pihak Swasta: <i>“Jelas ada, kita harus saling memahami dan sepakat, kalau tidak saling memahami dan tidak sepakat mungkin kami bentrok. Contoh kecilnya, jalan Sukamulya ini, kami (gaspol) memperbaiki, merehabilitasi, bahkan membangun. Mereka (pemerintah) tidak keberatan, padahal itu jalan mereka. Kita saling memahami, kami memahami pemerintah bukan hanya mengurus jalan ini saja, sebaliknya pemerintah juga memahami keterbatasan mereka terhadap anggaran untuk memperbaiki jalan ini.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Kesepakatan dan pemahaman ketika melakukan kolaborasi tentu ada, namun tidak sedikit juga yang tidak sepaham dan tidak sepakat, itu wajar namanya juga berbeda-beda kepala dan pemikiran.”</i></p>
<p>3. <i>Institutional Design</i> (Desain Kelembagaan)</p>	<p>1. Adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang berkolaborasi dalam memberikan masukan maupun pengambilan keputusan</p>	<p>1. Kepala Desa: <i>“Tentu ada, partisipasinya dengan cara memberi masukan, sumbang saran yang membangun. Serta ada juga yang memberi segala kebutuhan-kebutuhan pemerintahan desa, bahkan mereka mengerti sendiri demi kebutuhan umum.”</i></p> <p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Untuk partisipasi ada, terutama dalam memberi masukan seperti kritik yang membangun dari hal yang kurang baik menjadi baik, dan masukan-masukan lainnya.”</i></p> <p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Kalau memberi masukan pasti ada. Tapi kalau untuk memberi keputusan tidak ada, karena itu kewajiban pemerintah ahli memberikan kebijakan atau keputusan, yang terpenting tetap sejalan, dan</i></p>

		<p><i>mereka juga tetap berjalan, kami tidak saling intervensi,”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Partisipasi aktif tentu ada, seperti memberi kritik, sumbang saran, masukan-masukan dan ide-ide yang membangun.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Partisipasi aktif tentu ada, kami sering melibatkan Pak Kades, ketika kami sedang merencanakan suatu kegiatan di Gaspol, untuk sekadar memberi masukan atau sumbang saran. Sebaliknya ketika ada rapat di Desa pun, terkait anggaran, pembangunan kami di undang oleh Pemerintah Desa, jadi benar-benar terjalin kolaborasinya.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Sepengetahuan saya ada, karena ketika ada rapat dusun tokoh-tokoh atau pihak yang menjalin kolaborasi selalu meminta saran dan pendapat kepada kami, jadi peran serta kami sangat dilibatkan.”</i></p>
	<p>2. Adanya transparansi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya</p>	<p>1. Kepala Desa: <i>“Transparansi jelas ada, dan harus ada. Karena kita juga diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”</i></p> <p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Jelas ada, soalnya nilai transparansi paling banyak di bidang infrastruktur, kita selalu menjabarkannya di media informasi dan media sosial yang ada di Desa Sukamulya.”</i></p> <p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Tentu ada, itu juga membuat pembangunan semuanya di upload, dari segi sumber biayanya, kemudian anggaran yang dipakai, tempatnya, luas dan panjangnya atau volume pekerjaannya. Kemudian yang diselenggarakan oleh lembaga lain, kami tetap terbuka, tidak ada yang ditutupi, karena kami</i></p>

		<p><i>mempertanggungjawabkan itu secara moral dan birokrasi.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Kalau transparansi itu harus ada, kami selalu transparansi dalam hal program, sumber keuangan dan sumber daya. Transparansi tersebut selalu kami munculkan di dalam sebuah papan pengumuman, baliho, serta situs web resmi Pemerintah Desa Sukamulya.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Kalau LPJ pemerintah desa, kami (gaspol) belum pernah di undang. Tapi ketika LPJ gaspol dilakukan yang selalu bertepatan dengan hari ulang tahun gaspol, disaksikan oleh seluruh relawan, masyarakat, dan pemerintah desa. Kami (gaspol) melaporkan transparansi, mulai dari pemasukan dan pengeluaran keuangan serta kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Kalau perihal transparansi tentu ada, setiap ada kegiatan juga sering di transparansikan di baliho-baliho, sehingga kami masyarakat dengan mudah mengetahuinya”</i></p>
<p>4. <i>Fasilitative Leadership</i> (Kepemimpinan Fasilitatif)</p>	<p>1. Adanya pengawasan dan evaluasi mengenai kolaborasi pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian Desa Sukamulya.</p>	<p>1. Kepala Desa: <i>“Jelas ada, karena adanya evaluasi itu untuk membahas dan mengetahui segala kekurangan dan kelebihan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.”</i></p> <p>2. Kaur Perencanaan: <i>“Pengawasan dan evaluasi tentu ada, seperti selalu diadakannya rapat koordinasi satu bulan sekali oleh BPD yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pihak ketiga, hal tersebut untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.”</i></p>

		<p>3. Kasi Pelayanan: <i>“Kalau pengawasan dan evaluasi itu wajib harus ada, karena untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan, menilai mandiri atau tidaknya suatu Desa, karena dari kata mandiri juga itu yang menilai juga kan dari orang lain. Kami hanya melaksanakan pembangunan seperti ini, pencapaian seperti ini, dengan dibantu pihak ketiga.”</i></p> <p>4. Ketua BPD: <i>“Evaluasi dan pengawasan jelas ada, cuman belum ditingkatkan, mungkin kedepannya akan dilaksanakan pengawasan lebih detail dan menyeluruh.”</i></p> <p>5. Pihak Swasta: <i>“Kalau pengawasan tentu ada, kami (gaspol) ketika melakukan kolaborasi dengan pemerintah selalu diawasi oleh seluruh relawan, dan masyarakat Desa Sukamulya. Sementara evaluasi hampir setiap kegiatan selalu melakukan evaluasi, karena evaluasi itu wajib.”</i></p> <p>6. Masyarakat: <i>“Terkait pengawasan dan evaluasi jelas ada, karena hasil kekurangan dan kelebihan itu dihasilkan dari evaluasi, kami masyarakat selalu dilibatkan dalam rapat evaluasi.”</i></p>
--	--	---

4. Lampiran Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0074/35/SP/AK/DI/II/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 1 Februari 2024

Kepada
Yth. **Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis**
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Dea Nurgiawan
NIM : 3506200098
Tingkat : IV
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan penelitian di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 30 April 2024.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

“Kolaborasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

5. Lampiran Turnitin



Similarity Report ID: oid:6849:64068925

PAPER NAME

BAB I (Dea Nurgiawan)

WORD COUNT

1239 Words

CHARACTER COUNT

8558 Characters

PAGE COUNT

8 Pages

FILE SIZE

33.7KB

SUBMISSION DATE

Aug 7, 2024 2:02 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 7, 2024 2:02 PM GMT+7

● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material

6. Lampiran Dokumentasi

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kepala Desa Sukamulya



2. Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Sukamulya



3. Wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Sukamulya



4. Wawancara dengan Ketua BPD Desa Sukamulya



5. Wawancara dengan Gaspol



6. Wawancara dengan Masyarakat Desa Sukamulya



7. Memberikan surat izin penelitian



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Dea Nurgiawan
NIM : 3506200098
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cipari Rt 01 Rw 03 Desa Karangmekar Kec. Karangnunggal kab. Tasikmalaya
No. HP : 085320279557
Email : dea.nurgiawan77@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD : SDN Cipari
SMP/MTs : Mts Negeri 3 Tasikmalaya
SMA : SMAN 1 Karangnunggal

Pengalaman Organisasi:

2020-2021 : Staff Anggota Muda HMPIP FISIP UNIGAL
2021-2022 : Koordinator Dept. Kesma HMPIP FISIP UNIGAL
2022-2023 : Staff Anggota Dept. Riset, Data, Analisis BEM FISIP UNIGAL
2023-2024 : Staff Anggota Dept. kewirausahaan GENBI UNIGAL